

RINGKASAN

GIMAS KUSBARI, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, "Akibat Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Putusan Perkara Pemalsuan Akta Jual Beli Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN. Jkt. Brt.", Komisi Pembimbing, Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D, Anggota, Dr. Budiyo, S.H., M.Hum.

Seiring dengan semakin meningkatnya angka kepadatan penduduk di Indonesia. Kebutuhan terhadap tanah selalu bertambah, tanah berperan penting bagi kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap PPAT yang turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan implikasi hukum terhadap akta jual beli yang memuat keterangan palsu pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Akibat hukum terhadap PPAT yang turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pemalsuan terhadap Akta Autentik dengan ancaman pidana paling lama 8 (delapan) tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Implikasi hukum terhadap akta jual beli yang memuat keterangan palsu pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, akta tersebut tidak sah dan batal demi hukum yang artinya akta tersebut dianggap tidak pernah ada.

Kata kunci: Akibat Hukum, PPAT, Pemalsuan, Akta Jual Beli.

SUMMARY

GIMAS KUSBARI, Master of Notary Study Program, Postgraduate Program, Jenderal Soedirman University, "Legal Consequences of Land Deed Drafting Officials (PPAT) in the Decision on the Case of Forgery of Sale and Purchase Deeds, West Jakarta District Court Number 248/Pid.B/2022/PN. Jkt. Brt.",", Supervisory Commission, Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D, Member, Dr. Budiyo, S.H., M.Hum.

Along with the increasing population density in Indonesia. The need for land is always increasing, land plays an important role in people's lives. This research aims to analyze the legal consequences for PPAT who participated in committing the crime of forgery in the West Jakarta District Court Case Decision Number 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt and the legal implications of the sale and purchase deed containing false information in the Decision West Jakarta District Court Case Number 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. This research was conducted using a normative juridical approach, the research specifications are descriptive. Data collection using literature study, presented in the form of narrative text arranged systematically, and analyzed normatively qualitatively.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the legal consequences for PPAT who participated in committing the criminal act of forgery in the West Jakarta District Court Case Decision Number 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt have fulfilled all the elements of the criminal act of forgery against Authentic Deed with a maximum penalty of 8 (eight) years in prison as regulated in Article 264 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. The legal implications of the sale and purchase deed containing false information in the West Jakarta District Court Case Decision Number 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, the deed is invalid and null and void, which means the deed is deemed to have never existed.

Keywords: Legal Consequences, PPAT, Forgery, Sale and Purchase Deed.